

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA SIDODOWO**  
**KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**



**LAMONGAN**  
**2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**KECAMATAN MODO**  
**PEMERINTAH DESA SIDODOWO**  
*Jalan Manunggal Nomor 01 Sidodowo – Kode Pos 62275*

---

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SIDODOWO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidodowo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 475.850.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 475.560.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 213.710.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 261.850.000,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. 0,-           |
| 2) Pengeluaran    | Rp. 0,-           |

## **Pasal 3**

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## **Pasal 4**

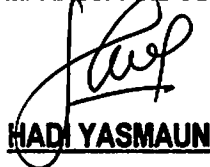
Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## **Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidodowo  
Pada tanggal 07 Februari 2013

**KEPALA DESA SIDODOWO**



**HADI YASMAUN**

Lampiran Peraturan Desa Sidodowo Kec. Modo  
 Kab. Lamongan  
 Nomor : 01 Tahun 2013  
 Tanggal : 07 Pebruari 2013  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja  
 Desa Sidodowo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO  
 TAHUN ANGGARAN 2013

| KODE REKENING | URAIAN                                                   | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | KET |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----|
| 1             | 2                                                        | 3                | 4              | 5   |
| 1             | PENDAPATAN                                               |                  |                |     |
| 1.1           | Pendapatan Asli Desa                                     | 124.355.000      | 177.280.000    |     |
| 1.1.1         | Hasil Usaha Desa                                         | 1.500.000        | 1.500.000      |     |
| 1.1.1.1       | BUMDes Air Bersih                                        | 1.200.000        | 1.200.000      |     |
| 1.1.1.2       | Hasil usaha Kopwan                                       | 300.000          | 300.000        |     |
| 1.1.2         | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa                          | 104.050.000      | 104.050.000    |     |
| 1.1.2.1       | Tanah Kas Desa                                           | 104.050.000      | 104.050.000    |     |
| 1.1.2.1.1     | Sewa Bengkok Kades                                       | 27.500.000       | 27.500.000     |     |
| 1.1.2.1.2     | Sewa Bengkok Kasi dan Kaur                               | 16.250.000       | 16.250.000     |     |
| 1.1.2.1.3     | Sewa Bengkok Kepala Dusun                                | 57.500.000       | 57.500.000     |     |
| 1.1.2.1.4     | Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS                              | 1.800.000        | 1.800.000      |     |
| 1.1.2.1.5     | Sewa Tanah Desa lainnya                                  | 1.000.000        | 1.000.000      |     |
| 1.1.2.2       | Pasar Desa                                               | -                | -              |     |
| 1.1.2.3       | Pasar Hewan                                              | -                | -              |     |
| 1.1.2.4       | Tambatan Perahu                                          | -                | -              |     |
| 1.1.2.5       | Bangunan Desa                                            | -                | -              |     |
| 1.1.2.6       | Pelelangan Ikan yang dikelola Desa                       | -                | -              |     |
| 1.1.2.7       | Lain-lain Kekayaan milik Desa                            | -                | -              |     |
| 1.1.3         | Hasil Swadaya dan Partispasi                             | 9.955.000        | 63.205.000     |     |
| 1.1.3.1       | Swadaya penunjang ADD dan Bansun                         | 8.205.000        | 8.205.000      |     |
| 1.1.3.2       | Swadaya penunjang Jalan Poros , Jembatan dan saluran air | 1.750.000        | 5.000.000      |     |
| 1.1.3.2       | Swadaya pelaksanaan Pemilihan kepala Desa                | -                | 50.000.000     |     |
| 1.1.4         | Hasil Gotong Royong                                      | 5.850.000        | 5.375.000      |     |
| 1.1.4.1       | Gotong royong dinilai dengan uang                        | 5.850.000        | 5.375.000      |     |
| 1.1.5         | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah                  | 3.000.000        | 3.150.000      |     |
| 1.1.5.1       | Leges surat menyurat                                     | 1.320.000        | 1.375.000      |     |
| 1.1.5.2       | Leges jual beli Tanah                                    | 1.100.000        | 1.175.000      |     |
| 1.1.5.3       | Leges NTCR                                               | 580.000          | 600.000        |     |
| 1.1.5.4       | Hasil Infaq dan Shodakoh                                 | -                | -              |     |
| 1.2           | Bagi Hasil Pajak                                         | 7.430.000        | 7.430.000      |     |
| 1.2.1         | Bagi hasil pajak Kabupaten                               | 7.430.000        | 7.430.000      |     |
| 1.2.1.1       | Bagi hasil PBB (Baku x 64,8 x 10 %)                      | 4.200.000        | 4.200.000      |     |
| 1.2.1.2       | UP. PBB                                                  | 3.230.000        | 3.230.000      |     |
| 1.3           | Bagi Hasil Retrebusi                                     | -                | -              |     |
| 1.3.1         | Bagi hasil penerimaan Retrebusi                          | -                | -              |     |
| 1.4           | Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah        | 98.000.000       | 103.500.000    |     |
| 1.4.1         | ADD                                                      | 46.500.000       | 46.500.000     |     |
| 1.4.2         | BANSUN                                                   | 49.500.000       | 49.500.000     |     |
| 1.4.3         | Bantuan RT                                               | -                | 7.500.000      |     |

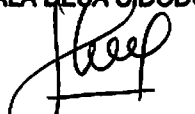
| 1         | 2                                                                       | 3                  | 4                  | 5 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 1.5       | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya | <u>294.000.000</u> | <u>185.850.000</u> |   |
| 1.5.1     | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat                                       | -                  | -                  |   |
| 1.5.2     | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi                                    | 150.000.000        | -                  |   |
| 1.5.2.1   | Pembangunan plengsengan irigasi (JASMAS)                                | 100.000.000        | -                  |   |
| 1.5.2.1   | Pembangunan Jalan Poros Desa (BKD)                                      | 50.000.000         | -                  |   |
| 1.5.3     | Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten                                   | 144.000.000        | 185.850.000        |   |
| 1.5.3.1   | TPAPD Kades                                                             | 8.400.000          | 9.600.000          |   |
| 1.5.3.2   | TPAPD Kasi dan Kaur                                                     | 33.000.000         | 36.000.000         |   |
| 1.5.3.3   | TPAPD Kasun                                                             | 61.200.000         | 66.600.000         |   |
| 1.5.3.4   | TP. BPD                                                                 | 4.400.000          | 5.650.000          |   |
| 1.5.3.5   | Dana Asuransi Kepala Desa                                               | 1.000.000          | 1.000.000          |   |
| 1.5.3.6   | Bantuan program E-KTP                                                   | 1.000.000          | -                  |   |
| 1.5.3.7   | Puma Bakti Kepala Desa                                                  | -                  | 5.000.000          |   |
| 1.5.3.8   | Puma Bakti BPD                                                          | -                  | 5.500.000          |   |
| 1.5.3.9   | Bantuan Pemilihan Kepala Desa                                           | -                  | 6.500.000          |   |
| 1.5.3.10  | Dana bantuan pemb. Jalan Poros Desa                                     | 35.000.000         | 50.000.000         |   |
| 1.5.4     | Bantuan Keuangan Desa lainnya                                           | -                  | -                  |   |
| 1.6       | Hibah                                                                   | <u>1.500.000</u>   | <u>1.500.000</u>   |   |
| 1.6.1     | Hibah dari Pemerintah                                                   | -                  | -                  |   |
| 1.6.2     | Hibah dari Pemerintah Propinsi                                          | -                  | -                  |   |
| 1.6.3     | Hibah dari Pemerintah Kabupaten                                         | -                  | -                  |   |
| 1.6.4     | Hibah dari badan/organisasi/swasta                                      | 1.500.000          | 1.500.000          |   |
| 1.6.4.1   | Hibah dari BKD (Badan Kredit Desa)                                      | 1.500.000          | 1.500.000          |   |
| 1.6.5     | Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan                               | -                  | -                  |   |
| 1.7       | Sumbangan dari Pihak ke Tiga                                            | -                  | -                  |   |
| 1.7.1     | Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa                                | -                  | -                  |   |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b><br>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)               | <b>523.285.000</b> | <b>475.560.000</b> |   |
| 2         | <b>BELANJA</b>                                                          |                    |                    |   |
| 2.1       | <b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>                             | <u>291.785.000</u> | <u>213.710.000</u> |   |
| 2.1.1     | <b>Belanja Pegawai / Honorarium</b>                                     | <u>3.230.000</u>   | <u>3.230.000</u>   |   |
| 2.1.1.1   | Honorarium Petugas Pemungut PBB                                         | 3.230.000          | 3.230.000          |   |
| 2.1.1.2   | Honorarium Petugas Linmas Desa                                          | -                  | -                  |   |
| 2.1.1.3   | Honorarium Pengurus RT/RW                                               | -                  | -                  |   |
| 2.1.1.4   | Honorarium PKBD / sub PKBD                                              | -                  | -                  |   |
| 2.1.2     | <b>Belanja Barang / Jasa</b>                                            | <u>288.555.000</u> | <u>210.480.000</u> |   |
| 2.1.2.1   | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>                                         | <u>6.200.000</u>   | <u>63.050.000</u>  |   |
| 2.1.2.1.1 | Perjalanan Dinas Kedes                                                  | 800.000            | 800.000            |   |
| 2.1.2.1.2 | Perjalanan Dinas Perangkat Desa                                         | 3.650.000          | 3.650.000          |   |
| 2.1.2.1.3 | Perjalanan Dinas BPD                                                    | 150.000            | 150.000            |   |
| 2.1.2.1.4 | Perjalanan Dinas LPM                                                    | 150.000            | 150.000            |   |
| 2.1.2.1.5 | Perjalanan Dinas PKK                                                    | 300.000            | 300.000            |   |
| 2.1.2.1.6 | Perjalanan Dinas PKBD / sub PKBD                                        | 150.000            | 150.000            |   |
| 2.1.2.1.7 | Biaya Rapat                                                             | 1.000.000          | 1.500.000          |   |
| 2.1.2.1.8 | Biaya Pemilihan Kepala Desa                                             | -                  | 56.500.000         |   |
| 2.1.2.2   | <b>Belanja Bahan / Material</b>                                         | <u>281.355.000</u> | <u>146.430.000</u> |   |
| 2.1.2.2.1 | Belanja ATK                                                             | 1.225.000          | 1.500.000          |   |
| 2.1.2.2.2 | Belanja Peralatan Kantor                                                | 1.050.000          | 750.000            |   |
| 2.1.2.2.3 | Pemeliharaan Kantor / Balai Desa                                        | 650.000            | 750.000            |   |

| 1          | 2                                                                 | 3                  | 4                  | 5               |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 2.1.2.2.4  | Pembayaran Rekening Listrik                                       | 600.000            | 600.000            |                 |
| 2.1.2.2.5  | Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)                             | 750.000            | 750.000            |                 |
| 2.1.2.2.6  | Belanja Bahan / Material ADD                                      | 36.130.000         | 36.130.000         |                 |
| 2.1.2.2.7  | Belanja Bahan / Material Bansun                                   | 54.450.000         | 54.450.000         |                 |
| 2.1.2.2.8  | Belanja Bahan/Material Japordes                                   | 35.000.000         | 50.000.000         |                 |
| 2.1.2.2.9  | Belanja Bahan/Material Japordes (BKD)                             | 50.000.000         | -                  |                 |
| 2.1.2.2.10 | Belanja Bahan/Material Plengsengan irigasi (JASMAS)               | 100.000.000        | -                  |                 |
| 2.1.2.2.11 | Belanja Material Perawatan Jalan Poros Desa                       | 1.500.000          | 1.500.000          |                 |
| 2.1.2.3    | Pembayaran Premi Asuransi                                         | 1.000.000          | 1.000.000          |                 |
| 2.1.2.3.1  | Asuransi Kepala Desa                                              | 1.000.000          | 1.000.000          |                 |
| 2.1.3      | Belanja Modal                                                     | -                  | -                  |                 |
| 2.1.3.1    | Belanja Modal Jaringan                                            | -                  | -                  |                 |
| 2.2        | Belanja Tidak Langsung<br>(2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5) | 231.500.000        | 261.850.000        |                 |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap                               | 211.050.000        | 231.400.000        |                 |
| 2.2.1.1    | Belanja Pegawai / Penghasilan Kades                               | 35.900.000         | 42.100.000         |                 |
| 2.2.1.1.1  | Hasil sewa bengkok Kades                                          | 27.500.000         | 27.500.000         |                 |
| 2.2.1.1.2  | TPAPD Kades                                                       | 8.400.000          | 9.600.000          |                 |
| 2.2.1.1.3  | Puma Bakti Kepala Desa                                            | -                  | 5.000.000          |                 |
| 2.2.1.2    | Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes                              | 1.800.000          | 1.800.000          |                 |
| 2.2.1.2.1  | Tunjangan Kinerja Sekdes PNS                                      | 1.800.000          | 1.800.000          |                 |
| 2.2.1.3    | Belanja Pegawai / Penghasilan Kasi/Kaur                           | 49.250.000         | 52.250.000         |                 |
| 2.2.1.3.1  | Hasil sewa bengkok 3 Kasi dan 2 Kaur                              | 16.250.000         | 16.250.000         |                 |
| 2.2.1.3.2  | TPAPD 3 Kasi dan 2 Kaur                                           | 33.000.000         | 36.000.000         |                 |
| 2.2.1.4    | Belanja Pegawai / Penghasilan Kasun                               | 118.700.000        | 124.100.000        |                 |
| 2.2.1.4.1  | Hasil sewa bengkok 9 Kasun                                        | 57.500.000         | 57.500.000         |                 |
| 2.2.1.4.2  | TPAPD 9 Kasun                                                     | 61.200.000         | 66.600.000         |                 |
| 2.2.1.5    | Belanja Pegawai / Penghasilan BPD                                 | 4.900.000          | 11.150.000         |                 |
| 2.2.1.5.1  | Uang sidang BPD                                                   | -                  | -                  |                 |
| 2.2.1.5.2  | TP. BPD                                                           | 4.400.000          | 5.650.000          |                 |
| 2.2.1.5.3  | Belanja Pembentukan BPD                                           | 500.000            | -                  |                 |
| 2.2.1.5.4  | Puma Bakti BPD                                                    | -                  | 5.500.000          |                 |
| 2.2.2      | Belanja Hibah                                                     | -                  | -                  |                 |
| 2.2.3      | Belanja Bantuan Sosial                                            | 3.000.000          | 6.000.000          |                 |
| 2.2.3.1    | Bantuan PHBN/PHBI                                                 | 1.500.000          | 1.500.000          |                 |
| 2.2.3.2    | Kegiatan Bersih Desa                                              | 1.500.000          | 1.000.000          |                 |
| 2.2.3.3    | Perfombaan Desa                                                   | -                  | 3.500.000          |                 |
| 2.2.4      | Belanja Bantuan Keuangan                                          | 14.950.000         | 21.450.000         |                 |
| 2.2.4.1    | Operasional Pemerintahan Desa                                     | 3.450.000          | 3.460.000          |                 |
| 2.2.4.2    | Operasional BPD                                                   | 3.000.000          | 3.000.000          |                 |
| 2.2.4.3    | Operasional LPM                                                   | 2.500.000          | 2.500.000          |                 |
| 2.2.4.4    | Operasional PKK                                                   | 3.000.000          | 3.000.000          |                 |
| 2.2.4.5    | Operasional Karang Taruna                                         | 1.000.000          | 1.000.000          |                 |
| 2.2.4.6    | Operasional Posyandu                                              | 500.000            | 500.000            |                 |
| 2.2.4.7    | Operasional Linmas                                                | 500.000            | 500.000            |                 |
| 2.2.4.8    | Operasional RT / RW                                               | -                  | 7.500.000          | 30 X Rp.250.000 |
| 2.2.4.9    | Operasional Program E-KTP                                         | 1.000.000          | -                  |                 |
| 2.2.5      | Belanja Tak Terduga                                               | 3.000.000          | 3.000.000          |                 |
| 2.2.5.1    | Keadaan Darurat                                                   | 2.000.000          | 2.000.000          |                 |
| 2.2.5.2    | Bencana Alam                                                      | 1.000.000          | 1.000.000          |                 |
|            | <b>JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)</b>                                   | <b>523.285.000</b> | <b>475.560.000</b> |                 |

| 1     | 2                                                  | 3 | 4 | 5 |
|-------|----------------------------------------------------|---|---|---|
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan                              |   |   |   |
| 3.1.1 | Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu | - | - |   |
| 3.1.2 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan      | - | - |   |
| 3.1.2 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan      | - | - |   |
| 3.1.3 | Penerimaan Pinjaman                                | - | - |   |
|       |                                                    |   |   |   |
| 3.2   | Pengeluaran Pembiayaan                             |   |   |   |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan                          | - | - |   |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa                              | - | - |   |
| 3.2.3 | Pembayaran Utang                                   | - | - |   |
|       | JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1-3.2)                        | - | - |   |

Ditetapkan di Sidodowo  
Pada tanggal 07 Pebruari 2012

KEPALA DESA SIDODOWO

  
**HADI YASMAUN**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO KECAMATAN MODO  
NOMOR : 188/ 02 /413.314.14.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDODOWO TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sidodowo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

**Memperhatikan :** Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Sidodowo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo tahun anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDODOWO TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidodowo Tahun Anggaran 2013.

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidodowo  
Pada tanggal 06 Pebruari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODOWO**



